

EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN NGANJUK

Richo Gunawan Linggarjati
NPP. 32.0555

Asdaf Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Keuangan Publik
Email: richolinggarjati21@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Womsiter Sinaga, SE., MM.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The regional budget planning process in Nganjuk Regency still faces a number of challenges, such as delays in data input, lack of human resource understanding of the new system, as well as network technical constraints and lack of socialization from the central government. This condition hinders the effectiveness of the preparation of budget planning documents. SIPD RI exists as a national integrated system that aims to increase transparency, efficiency, and accountability in regional financial management, including in the budget planning process. **Objective:** This study aims to determine the effectiveness of budget planning through the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) in Nganjuk Regency, as well as analyze the inhibiting factors, supporting factors, and optimization efforts carried out by local governments. **Methods:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach and is based on Duncan's theory of effectiveness in Steers which includes indicators of goal achievement, integration, and adaptation. Data was collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. **Results/Findings:** The study found that SIPD RI is quite effective in preparing budget planning that is more structured, integrative, and accountable. The dimension of goal achievement shows an increase in time efficiency and the achievement of planning targets. In terms of integration dimensions, SIPD RI facilitates coordination between work units even though there are still technical obstacles. Meanwhile, in the adaptation dimension, local governments showed a positive response through training and technical assistance. **Conclusion:** Budget planning through SIPD RI in Nganjuk Regency has shown quite good effectiveness, especially in the aspect of structured and integrative planning. Collaborative efforts such as technical training, strengthening coordination, and improving infrastructure are key to overcoming barriers. Therefore, the sustainability of strengthening human resource capacity and the use of technology needs to be continuously improved to support optimal budget planning.

Keywords: Effectiveness; Planning; Budget; Finance; Area.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Proses perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterlambatan *input* data, minimnya pemahaman SDM terhadap sistem baru, serta kendala teknis jaringan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat. Kondisi ini menghambat efektivitas penyusunan dokumen perencanaan anggaran. SIPD RI hadir sebagai sistem terintegrasi nasional yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam proses perencanaan anggaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Kabupaten Nganjuk, serta menganalisis faktor penghambat, faktor pendukung, dan upaya optimalisasi yang dilakukan pemerintah daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan didasarkan pada teori efektivitas Duncan dalam Steers yang mencakup indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa SIPD RI cukup efektif dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih terstruktur, integratif, dan akuntabel. Dimensi pencapaian tujuan menunjukkan peningkatan efisiensi waktu dan ketercapaian target perencanaan. Dari sisi dimensi integrasi, SIPD RI mempermudah koordinasi antar unit kerja meskipun masih terdapat kendala teknis. Sedangkan pada dimensi adaptasi, pemerintah daerah menunjukkan respons positif melalui pelatihan dan pendampingan teknis. **Kesimpulan:** Perencanaan anggaran melalui SIPD RI di Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan yang terstruktur dan integratif. Upaya kolaboratif seperti pelatihan teknis, penguatan koordinasi, dan peningkatan infrastruktur menjadi kunci dalam mengatasi hambatan. Oleh karena itu, keberlanjutan penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung perencanaan anggaran yang optimal.

Kata kunci: Efektivitas; Perencanaan; Anggaran; Keuangan; Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam undang-undang tersebut, Salah satu peran strategis Pemerintah Daerah adalah mengelola keuangan daerah, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 280 ayat (1) dan (2). Regulasi ini menegaskan pentingnya penerapan tata kelola keuangan yang efektif dan transparan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada Pasal 1 ayat 2, mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup sejumlah kegiatan strategis, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan azas pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat Sinurat (2018: 1). Salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah adalah proses perencanaan anggaran.

Perencanaan anggaran yang baik menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara nyata.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) hadir sebagai sistem terintegrasi nasional untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ Tahun 2023, SIPD RI ditetapkan sebagai satu-satunya sistem yang wajib digunakan oleh seluruh pemerintah daerah mulai tahun anggaran 2024. SIPD RI menggantikan berbagai sistem terdahulu seperti SIMDA dan SIPKD yang sebelumnya digunakan secara bervariasi oleh masing-masing daerah.

Kabupaten Nganjuk, sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional ini, telah mulai menerapkan SIPD RI pada proses perencanaan anggaran daerahnya. Studi Pramana dkk., (2023: 56) yang fokus penelitian pada Penerapan SIPD lama di Kabupaten Nganjuk menemui beberapa kendala, salah satunya keluhan server yang lambat. Hal ini mengakibatkan proses perencanaan anggaran belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan dari sistem baru tersebut

Efektivitas dapat dianalisis secara teoritis melalui pendekatan Duncan dalam Steers (1985: 53), yang menekankan pada tiga indikator utama: pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*). Teori ini relevan untuk menilai sejauh mana SIPD RI mampu mencapai tujuan penyusunan anggaran yang akuntabel, memfasilitasi kerja sama antar instansi daerah, serta beradaptasi dengan kompleksitas tantangan sistem baru.

Lebih jauh, penelitian-penelitian sebelumnya seperti oleh Arif and Firmansyah (2024) serta Yanti and Junaidi (2024), lebih banyak menitikberatkan pada aspek penggunaan SIPD dalam pelaporan dan penganggaran, bukan dalam konteks perencanaan. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian empiris terkait efektivitas SIPD RI dalam tahap perencanaan anggaran, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Celah penelitian inilah yang ingin ditelusuri secara lebih mendalam dalam studi ini, agar dapat memberikan kontribusi terhadap praktik pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan responsif.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Efektivitas perencanaan anggaran daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai sistem terintegrasi yang bertujuan menyempurnakan pengelolaan anggaran, termasuk proses perencanaannya. Namun, pada implementasinya di Kabupaten Nganjuk, perencanaan anggaran melalui SIPD RI masih menemui berbagai kendala baik teknis maupun struktural.

Permasalahan yang ditemukan dalam studi awal menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan dalam proses *input* data, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap sistem SIPD RI, gangguan jaringan, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah pusat (Kaiya 2022); (Rip'atin, Solikah, and Widiawati 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem SIPD RI dirancang sebagai solusi nasional, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan institusi dan sumber daya di daerah. Di Kabupaten Nganjuk, perencanaan anggaran sebelumnya juga masih bergantung pada sistem lama (SIMDA), yang menyebabkan transisi menuju SIPD RI menjadi kurang optimal

Studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Kumalasari & Fanida (2024) lebih banyak menyoroti efektivitas penggunaan SIPD dalam aspek teknis seperti kesesuaian fitur sistem dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian Yanti & Junaidi (2024) menekankan pada persoalan transisi dari SIPD ke SIPD RI dan kesiapan pegawai, sementara Arif & Firmansyah (2024) meneliti penerapan SIPD RI pada pelaporan keuangan, bukan pada tahap perencanaan anggaran. Artinya, terdapat celah penelitian terkait efektivitas perencanaan anggaran secara khusus melalui SIPD RI, terutama dengan

menggunakan pendekatan teoritis yang komprehensif seperti Teori Efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985: 53)

Lebih jauh, belum ada penelitian terdahulu yang mengkaji efektivitas SIPD RI dalam konteks perencanaan anggaran dengan tiga dimensi utama yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sebagaimana dikembangkan oleh Duncan. Hal ini penting mengingat perencanaan anggaran merupakan tahap awal dalam siklus pengelolaan keuangan daerah dan menjadi penentu kualitas anggaran yang akan disusun.

Kondisi tersebut menjadi landasan kuat bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pusat yang mendorong penerapan SIPD RI secara penuh dan realitas di daerah yang belum sepenuhnya siap dari segi SDM, teknis, serta kelembagaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan kontekstual untuk menganalisis efektivitas perencanaan anggaran melalui SIPD RI di Kabupaten Nganjuk secara sistematis, logis, dan berbasis teori, guna memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks perencanaan anggaran maupun konteks pengelolaan keuangan secara umum. Penelitian Dalloul, Ibrahim, dan Urus lainnya yang berjudul *Accounting Information Systems Effectiveness: Evidence from the Local Government Sector* menyoroiti keberhasilan AIS di sektor pemerintah daerah Palestina. Studi ini menunjukkan bahwa kualitas sistem dan informasi sangat mempengaruhi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna, meskipun kualitas layanan belum menunjukkan pengaruh signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan AIS dalam pengelolaan keuangan daerah (Dalloul, Ibrahim, & Urus 2024). Penelitian Garcia-Acevedo dkk. yang berjudul *Open Governments, Citizens Who Decide* membahas transformasi digital anggaran partisipatif di Bogotá, Kolombia. Studi ini menemukan bahwa platform digital *Bogotá Participa* mampu memperluas cakupan dan inklusi warga dalam proses pengambilan keputusan publik. Digitalisasi ini mempercepat integrasi masyarakat terpinggirkan dan meningkatkan kapasitas pengawasan warga terhadap pengelolaan dana publik (Garcia et al. 2021). Penelitian Cuadrado-Ballesteros, Santis, dan Bisogno dalam *Public-sector Financial Management and E-government* menemukan adanya hubungan kuat antara penerapan *e-government* dan reformasi akuntansi sektor publik berbasis *accrual* dan IPSAS. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan holistik dalam mengintegrasikan inovasi teknologi dan sistem akuntansi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam pengelolaan keuangan publik (Cuadrado-Ballesteros, Santis, & Bisogno 2021). Berdasarkan hasil penelitian Tumija dkk tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, penulis menemukan Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain : pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; Server yang tersedia kurang kuat; dan teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehingga laporannya belum *balance* dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai (Tumija et al. 2023). Penelitian Ekaputra yang berjudul Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk menemukan bahwa penggunaan SIPD pada tahun pertama penerapannya masih kurang efektif. Hambatan utamanya adalah kurangnya pemahaman terhadap aplikasi SIPD serta perubahan nomenklatur program yang membingungkan. Upaya penyelesaian dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan oleh Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan (Ekaputra 2021). Penelitian Pramana dkk. dengan judul Analisis Penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk menunjukkan

bahwa implementasi SIPD belum optimal karena masih banyak fitur yang belum berjalan dan sistem belum mampu berdiri sendiri. Pendekatan Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis faktor-faktor seperti sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan sikap pelaksana kebijakan, yang memengaruhi efektivitas implementasi SIPD di lingkungan BPKAD (Pramana et al. 2023). Penelitian Yanti dan Junaidi dalam Tinjauan atas Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Transisi SIPD ke SIPD RI pada BPKAD Mojokerto menemukan bahwa seluruh bidang di BPKAD Mojokerto telah menggunakan SIPD RI, namun tantangan utama adalah kesiapan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami sistem. Dukungan fasilitas dan sosialisasi menjadi kunci keberhasilan awal, tetapi masih diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur (Yanti & Junaidi 2024)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menawarkan pendekatan yang berbeda dari studi-studi sebelumnya, dengan mengangkat konteks efektivitas perencanaan anggaran melalui SIPD RI. Berbeda dengan penelitian terdahulu penelitian kali ini menggunakan konsep teori Duncan dalam Steers (1985: 53). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perencanaan anggaran yang dilakukan melalui SIPD RI. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam proses perencanaan anggaran, serta mengeksplorasi berbagai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Efektivitas Perencanaan Anggaran Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Nganjuk kemudian menganalisis faktor penghambat dan pendukung serta upaya dalam mengatasi hambatan melalui faktor pendukung yang ada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas perencanaan anggaran daerah. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menurut teori Simangunsong (2016: 215). Penelitian ini didasarkan oleh konsep teori Duncan dalam Steers (1985: 53). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan, Kepala Bidang Aset, *User* SIPD RI yang ada pada bidang perencanaan anggaran daerah. Pemilihan informan didasarkan pada peran strategis mereka dalam perencanaan anggaran melalui SIPD RI, yaitu sebagai pengambil kebijakan, pengelola teknis, dan pengguna langsung sistem, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017: 246) yaitu analisis *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) serta *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan). Kemudian penelitian dilaksanakan pada lingkup perencanaan anggaran daerah yang dilakukan melalui SIPD RI di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk mulai tanggal 6 - 25 Januari 2025. Dengan fokus pada unit ini, penelitian dapat lebih terarah dalam menganalisis efektivitas perencanaan anggaran daerah melalui SIPD RI.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas perencanaan anggaran daerah menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985: 53) diukur menggunakan tiga dimensi yaitu dimensi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pada Tabel 1 disajikan hasil wawancara untuk masing-

masing indikator pada setiap dimensi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil wawancara untuk masing-masing indikator

No	Dimensi	Indikator	Status Pencapaian
1.	Pencapaian Tujuan	Kurun waktu yang ditentukan	Tercapai
		Pencapaian target konkret	
2.	Integrasi	Prosedur perencanaan anggaran	Tercapai
		Sosialisasi	
3.	Adaptasi	Kemampuan Sumber daya Manusia	Tercapai
		Sarana Prasarana	

Sumber: Hasil pengolahan data riset, 2025

Berikut adalah pencapaian masing-masing indikator dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Dimensi Pencapaian Tujuan (*Goal Achievement*)

Pencapaian tujuan akan terlihat berdasarkan sejauh apa tahapan suatu kegiatan kerja atau program pencapaian sasaran yang ditentukan dari kegiatan ataupun program tersebut, begitu juga dengan pencapaian tujuan dalam pengaplikasian SIPD.

3.1.1 Kurun Waktu yang ditentukan

Penggunaan SIPD RI dalam proses perencanaan anggaran di BPKAD Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan efektivitas tinggi dari segi ketepatan waktu (*Time Frame*) sebagaimana diukur melalui dimensi pencapaian tujuan menurut teori Duncan dalam Steers (1985: 53). Sistem ini terbukti mampu mempercepat tahapan penyusunan dokumen anggaran seperti KUA, PPAS, dan RAPBD, yang seluruhnya dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan oleh Permendagri, serta ditandai dengan status "selesai dan dikunci" pada sistem. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD RI tidak hanya mempercepat proses birokrasi anggaran, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara nyata.

Penetapan APBD (Perda APBD TA. 2025)				
0 Hari 0 Jam 0 Menit 0 Detik				
Pencarian				
Tahap	Sub Tahap	Status	Jadwal Mulai	Jadwal Selesai
Penetapan APBD	Perda APBD TA. 2025	Selesai dan Dikunci	31/12/2024 18:39	31/12/2024 18:43
Penyesuaian Hasil Evaluasi RAPBD	Penyesuaian Hasil Evaluasi RAPBD TA. 2025	Selesai dan Dikunci	06/12/2024 14:58	31/12/2024 18:05
RAPBD	Penyusunan Rancangan APBD TA. 2025 (RKA dan Hasil ...	Selesai dan Dikunci	02/09/2024 12:28	06/12/2024 14:56
RAPBD	RKA SKPD BAHAN REVIU APIP	Selesai dan Dikunci	23/08/2024 7:51	02/09/2024 12:25
Penetapan KUA-PPAS	Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS TA. 2025 Bersama ...	Selesai dan Dikunci	17/08/2024 13:12	21/08/2024 9:26
KUA dan PPAS	KUA dan PPAS TA. 2025	Selesai dan Dikunci	03/07/2024 18:47	17/08/2024 13:09

Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2025

Gambar 1
Tampilan informasi jadwal penganggaran SIPD RI

Hasil dokumentasi dan observasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk Tahun Anggaran 2025, diketahui bahwa tahapan penyusunan KUA dan PPAS telah dilaksanakan sejak 31 Mei 2024 dan selesai pada 23 Juni 2024, yang berarti hanya membutuhkan waktu selama 23 hari. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen kebijakan anggaran tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan ketentuan waktu dalam peraturan. Selain itu, tahapan penyusunan RAPBD yang biasanya memerlukan waktu cukup panjang, dalam sistem SIPD dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari, yaitu dari 3 Oktober hingga 14 Oktober 2024. Seluruh tahapan lainnya juga telah selesai tepat waktu dan ditandai dengan status “selesai dan dikunci” pada sistem SIPD RI.

Tabel 2.
Hasil Temuan Data Indikator kurun waktu yang ditentukan

Informasi yang dihasilkan	Data lain	Temuan
Output yang dihasilkan tidak memerlukan waktu lama untuk proses pengelolaan keuangan	Observasi	
Perencanaan Anggaran diproses tepat waktu sebelum dokumen diajukan pada DPRD	Observasi	Tepat waktu
Penyajian laporan keuangan tidak mengalami kendala sehingga laporan keuangan dihasilkan tepat waktu	Observasi	

Sumber: Hasil pengolahan data riset, 2025

3.1.2 Pencapaian target konkret

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan SIPD RI di Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan pencapaian target konkret dalam perencanaan anggaran secara signifikan. SIPD RI memungkinkan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dilakukan secara terintegrasi, terdigitalisasi, dan tepat waktu, dengan fitur pelacakan otomatis serta validasi sistematis. Berbeda dengan SIMDA dan SIPD awal yang masih parsial dan rentan terhadap inkonsistensi data, SIPD RI mampu menyelaraskan output kegiatan dengan kalender dan dokumen perencanaan resmi seperti RKPD dan Rencana Kerja OPD. Dengan demikian, SIPD RI terbukti mendukung efektivitas pencapaian sasaran anggaran daerah secara lebih akurat, efisien, dan transparan sesuai prinsip *good governance*. Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Rip’atin, Solikah, and Widiawati (2021: 726) menemukan bahwa dalam penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, terdapat ketidaksesuaian jumlah pada beberapa buku dan laporan keuangan selama proses penyusunan hingga tahap pengesahan. Ketidaksesuaian ini

menyebabkan ketidakakuratan data, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi SIMDA Keuangan.

Sub Tahap	Status	Jadwal Mulai	Jadwal Selesai	Aksi
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Selesai	10/07/2023 14.49	12/07/2023 15.00	  

Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2025

Gambar 2
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

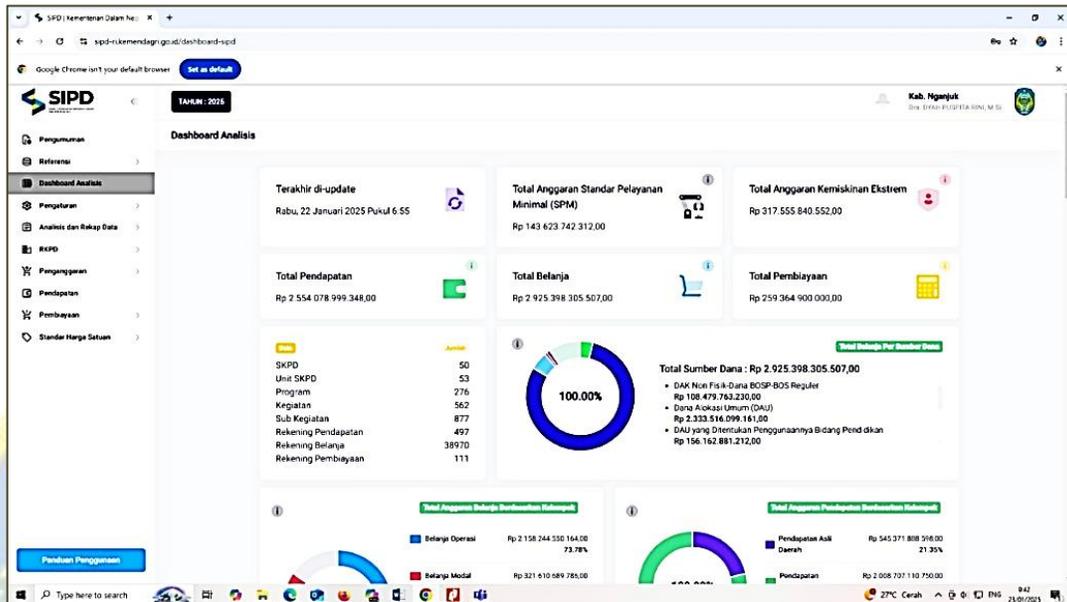
Berdasarkan analisis terhadap gambar tahapan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Status “Selesai” yang tercatat dalam sistem, serta kejelasan jadwal mulai dan selesai, mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai target perencanaan secara konkret. Hal ini menunjukkan bahwa indikator efektivitas pada aspek pencapaian target konkret telah terpenuhi, di mana output kegiatan selaras dengan kalender perencanaan anggaran daerah yang ditetapkan oleh regulasi.

3.2. Dimensi Integrasi (*Integration*)

SIPD RI memainkan peran krusial dalam meningkatkan integrasi data dan proses dalam perencanaan anggaran daerah di lingkungan pemerintahan daerah . Integrasi ini diukur dengan indikator prosedur perencanaan anggaran dan sosialisasi sebagai berikut :

3.3.1 Prosedur

Prosedur perencanaan anggaran di Kabupaten Nganjuk mengalami transformasi signifikan melalui penerapan SIPD RI, dari sistem sebelumnya yang manual dan terpisah (SIMDA), menuju sistem yang lebih terstruktur, terdigitalisasi, dan terintegrasi secara menyeluruh. SIPD RI memfasilitasi keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, memungkinkan input data yang sistematis, validasi otomatis, serta pelaporan keuangan secara real-time. Kehadiran *dashboard* analisis pada SIPD RI memperkuat transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.



Sumber : Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2025

Gambar 3
Ringkasan Menu SIPD RI

Gambar *dashboard* SIPD RI Tahun Anggaran 2025 milik Kabupaten Nganjuk menampilkan antarmuka yang komprehensif dan terstruktur dalam memantau pengelolaan anggaran daerah secara *real-time*. Dalam konteks indikator prosedur dalam SIPD RI, sistem ini mendukung berbagai tahapan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, dimulai dari penginputan data keuangan, penyusunan anggaran, hingga evaluasi keuangan daerah. Informasi yang ditampilkan mencakup total pendapatan, belanja, pembiayaan, alokasi anggaran untuk pelayanan minimal (SPM), serta anggaran penanganan kemiskinan ekstrem, lengkap dengan visualisasi grafik dan distribusi per jenis belanja maupun sumber dana. Sistem ini juga menyajikan data terperinci seperti jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, hingga rincian rekening pendapatan dan belanja. Hal ini mencerminkan bahwa SIPD RI tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai sarana *monitoring* yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola keuangan daerah sesuai prinsip *good governance*.

3.3.2 Sosialisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk proaktif dalam menghadapi minimnya dukungan sosialisasi dan pelatihan dari Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi SIPD RI. Melalui inisiatif mandiri, BPKAD menyelenggarakan pelatihan dengan menghadirkan narasumber dari pusat, sehingga pemahaman tentang sistem dapat tersebar hingga ke tingkat daerah. Koordinasi intensif dengan tim IT Kemendagri terus dilakukan, dan pada tahun 2024, hambatan teknis berkurang secara signifikan, sehingga perencanaan anggaran melalui SIPD RI berjalan lebih efektif.



Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2025

Gambar 4
Pelatihan dengan Narasumber

3.3. Dimensi Adaptasi (*Adaptation*)

Mengukur efektivitas terdapat dimensi ketiga yaitu dimensi adaptasi yang memiliki indikator sebagai berikut :

3.3.3 Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor krusial dalam efektivitas perencanaan anggaran daerah melalui SIPD RI, khususnya dalam konteks transisi dari SIMDA ke SIPD dan kemudian SIPD RI. Meski SDM yang mahir teknologi tidak otomatis menguasai sistem informasi baru, proses adaptasi dan pemahaman teknis terhadap sistem yang semakin kompleks menjadi kebutuhan utama agar operasionalisasi sistem berjalan optimal. Keterbatasan SIMDA dalam integrasi proses perencanaan digantikan oleh SIPD dan SIPD RI yang lebih terintegrasi dan akuntabel, namun menuntut kesiapan dan kompetensi SDM yang lebih tinggi serta penyesuaian waktu yang ketat. Pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas SDM terbukti mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah, menegaskan bahwa kesiapan manusia sebagai pengguna sistem menjadi determinan utama keberhasilan implementasi teknologi informasi di sektor publik.



Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2025

Gambar 5

Peningkatan Kapasitas perencana dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.

3.3.4 Sarana dan Prasarana

Keberhasilan perencanaan anggaran daerah melalui SIPD RI sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, mencakup ketersediaan perangkat keras dan lunak, serta akses internet yang stabil dan cepat. Sebagai sistem berbasis web yang terhubung langsung dengan server pusat Kementerian Dalam Negeri, SIPD RI menuntut kesiapan teknis yang tinggi agar penginputan dan pengolahan data dapat berlangsung secara efektif, fleksibel, dan *real-time*. Kondisi sarana dan prasarana di BPKAD Kabupaten Nganjuk secara umum dapat dikatakan sudah cukup baik dalam mendukung perencanaan anggaran daerah melalui SIPD RI. Pemerintah daerah telah menyediakan perangkat keras seperti komputer dan sebagainya, serta memastikan ketersediaan jaringan internet sebagai syarat utama pengoperasian sistem berbasis daring ini.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan sistem perencanaan anggaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia di Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, terintegrasi, dan efisien. Sebagai platform digital yang dirancang untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran daerah dengan kebijakan nasional, SIPD RI menghadirkan sistem informasi yang menyatukan berbagai tahapan proses perencanaan mulai dari penyusunan rencana kerja, penginputan program dan kegiatan, hingga pengalokasian anggaran secara *real-time* dan terstandarisasi. Dengan adanya SIPD RI, pemerintah daerah dapat meminimalisasi praktik manual dan fragmentasi data, sehingga tercipta keterbukaan informasi serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, integrasi antarsistem dan antarperangkat daerah melalui SIPD RI turut memperkuat koordinasi internal serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih berbasis data. Efisiensi yang dihasilkan tidak hanya

berupa percepatan proses kerja, tetapi juga pengurangan potensi tumpang tindih program dan anggaran. Dengan demikian, penerapan SIPD RI menjadi instrumen penting dalam mendorong reformasi birokrasi serta transformasi digital pemerintahan daerah, sejalan dengan prinsip *good governance* yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. SIPD RI menjadi sarana penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen anggaran secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Penulis menemukan bahwa meskipun perencanaan anggaran daerah melalui SIPD RI di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala teknis sistem, serta kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, namun keberadaan SIPD RI telah memberikan dorongan positif bagi peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap proses perencanaan anggaran yang taat asas dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan temuan Nanda Dias yang menyatakan bahwa penggunaan SIPD di tahun pertama masih kurang efektif akibat minimnya pemahaman terhadap sistem dan perubahan nomenklatur yang membingungkan OPD, namun seiring dengan sosialisasi dan pendampingan, kualitas dokumen RPKD mulai menunjukkan perbaikan (Ekaputra 2021).

Sebagaimana program teknologi lainnya, SIPD RI juga menghadapi berbagai kekurangan, terutama dalam hal adaptasi pengguna dan stabilitas sistem. Beberapa pegawai menyebutkan bahwa sistem sering mengalami kendala teknis, seperti lambatnya akses, serta masih terbatasnya fitur yang tersedia. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Andy Pramana dkk., yang menemukan bahwa penerapan SIPD lama di BPKAD Kabupaten Nganjuk masih kurang efisien dan memerlukan sistem pendamping karena belum semua fitur SIPD dapat berfungsi secara maksimal (Pramana et al. 2023).

Karakteristik dari perencanaan anggaran daerah melalui SIPD RI sebagai sistem yang terpusat dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat menjadi aspek yang menarik. Adanya keharusan penggunaan SIPD RI oleh semua pemerintah daerah di Indonesia menciptakan standarisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, pelatihan teknis, serta integrasi data antar bidang diharapkan mampu memacu daerah dalam meningkatkan kualitas dokumen dan efisiensi kerja. Hal ini membuat pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk, berlomba untuk menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerja terbaik. Artinya, upaya ini merupakan bentuk nyata dari peningkatan kapasitas birokrasi dan pelaksanaan prinsip *good governance* berbasis teknologi informasi, sebagaimana juga disebutkan oleh Miftakul Rip'atin dalam penerapan SIMDA sebelumnya yang dinilai efektif dalam hal ketepatan waktu dan akurasi laporan namun pada SIMDA belum sepenuhnya terintegrasi (Rip'atin et al. 2021)

Lebih jauh lagi, perencanaan anggaran daerah melalui SIPD RI dalam jangka panjang diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi teknis, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di daerah. Peningkatan kapasitas SDM ini penting untuk membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang tidak hanya patuh prosedur, tetapi juga strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Harapan ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi nasional yang ingin mewujudkan pemerintah daerah yang adaptif, transparan, dan akuntabel di era digital.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat Perencanaan anggaran daerah melalui SIPD RI di Kabupaten Nganjuk ini yakni : faktor penghambat internal meliputi keterbatasan waktu dan beban kerja SDM, kurangnya pemahaman teknis, keterlambatan input data dari OPD, serta infrastruktur yang belum optimal. Sementara faktor penghambat eksternal mencakup perubahan kebijakan mendadak dari pusat, ketidakstabilan jaringan, gangguan sistem, dan sinkronisasi data yang belum sempurna. Di sisi lain, implementasi SIPD RI didukung secara internal oleh tersedianya SDM kompeten, pemahaman

aparatur terhadap dokumen perencanaan, komitmen pimpinan daerah, dan infrastruktur dasar yang memadai. Faktor pendukung eksternal meliputi regulasi yang jelas dari pemerintah pusat, pendampingan teknis, dan kebijakan nasional tentang digitalisasi sistem perencanaan.

BPKAD Kabupaten Nganjuk telah melakukan upaya strategis baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya langsung meliputi pelaksanaan bimbingan teknis secara intensif, asistensi proses *input*, penyusunan *timeline* yang jelas, pembentukan forum koordinasi lintas OPD, serta layanan konsultasi teknis. Sedangkan upaya tidak langsung mencakup peningkatan kualitas jaringan internet, pembaruan perangkat kerja, penyusunan SOP yang efektif, perawatan rutin terhadap sistem, komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, serta kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat aspek teknis. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam implementasi sistem informasi pemerintahan yang memadukan pengembangan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, koordinasi kelembagaan yang efektif, serta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tata kelola perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Perencanaan anggaran daerah melalui SIPD RI di Kabupaten Nganjuk dinilai efektif berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. SIPD RI membantu mendukung penyusunan anggaran yang sistematis, transparan, terintegrasi antar-perangkat daerah, serta adaptif terhadap perubahan kebijakan. Terdapat faktor penghambat optimalisasi SIPD dalam perencanaan anggaran antara lain keterbatasan SDM, ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah, dan intervensi politik. Untuk meminimalisir faktor penghambat dan memperkuat faktor pendukung BPKAD melakukan penguatan kapasitas, regulasi, dan koordinasi agar SIPD RI dapat berfungsi secara maksimal dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang akuntabel dan berbasis kinerja.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada obyek penelitian yang terbatas di lingkungan BPKAD, belum meneliti secara menyeluruh perencanaan pada setiap OPD dan keterlibatan Bappeda serta BPKAD dalam mendayagunakan SIPD RI.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih terbatas penelitian pada lingkungan BPKAD khususnya pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian sejenis disarankan melakukan penelitian penggunaan SIPD RI secara terintegrasi antara Bappeda, BPKAD dan OPD untuk mendapatkan model perencanaan terintegrasi antara institusi di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi obyek penelitian

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Rizal Nur, and Amrie Firmansyah. 2024. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar." *Akuntansiku* 3(1):15–29. doi: 10.54957/akuntansiku.v3i1.630.
- Cuadrado-Ballesteros, Beatriz, Serena Santis, dan Marco Bisogno. 2021. "Public-Sector Financial Management dan E-Government: The Role Played by Accounting Systems." *International Journal of Public Administration* 45(8):1–15. doi: 10.1080/01900692.2020.1868506.

- Dalloul, Mahmoud Hany M., Zuraeda binti Ibrahim, dan Sharina Tajul Urus. 2024. "Accounting Information Systems Effectiveness: Evidence from the Nigerian Banking Sector." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* 22 (2):2509–32. doi: <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00183>.
- Ekaputra, Nanda Dias. 2021. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk." *Otonomi* 21 (1):62–79. doi: <https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1.1606>.
- Garcia, Catalina, Jose Suarez, Omar Roa, Alejandra Torres, dan Jhon Garcia. 2021. "Gobiernos Abiertos, Ciudadanía Que Decide. Transformación Digital Del Mecanismo de Presupuestos Participativos En Bogotá A.C." LACCEI Inc. 1–8. doi: <http://dx.doi.org/10.18687/LEIRD2021.1.1.1>.
- Kaiya, Juan Antonio Pratama. 2022. "Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah." *Journal IPDN* 1–11.
- Kumalasari, Nadya Intan, dan Eva Hany Fanida. 2024. "Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Pada Efektivitas Penggunaan Platform SIPD Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta)." *Publika* 12(2):381–94. doi: <https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p381-394>.
- Pemerintah Indonesia. 2019. "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah."
- Pemerintah Indonesia. 2023. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ Tentang Implementasi SIPD. Indonesia.
- Pramana, Andy Chandra, Nonni Yap, Meme Rukmini, Sulthon Mahmudi, dan Eka Agustina. 2023. "Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk." *Ekuivalensi* 9(1):46–58. doi: <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/926/628>.
- Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."
- Rip'atin, Miftakul, Mar'atus Solikah, dan Hestin Sri Widiawati. 2021. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Pengelolaan Keuangan DPRKPP Kabupaten Nganjuk." *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 6(1):721–29. doi: <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/976%0Ahttps://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/download/976/844>.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- Sinurat, Dr. Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tumija, Asep Hendra, Marja Sinurat, and Haikal Ali. 2023. "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Siagian , n . d .). Manusia Telah Mengembangkan Peningkatan Teknologi Ya." *Jurnal Media Birokrasi* 5(1):79–91. doi: <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>.
- Yanti, Ullifah, dan Junaidi. 2024. "Tinjauan Atas Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Transisi SIPD Ke SIPD RI Pada BPKAD Mojokerto." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 8(3):28–38. doi: <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4395>.